



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 797/I/2014

I/JANUARI 2014



Optimalkan Aspal Buton Untuk Jalan Negara



Pengantar Redaksi

Pembaca yang terhormat,

Memasuki tahun baru 2014, Buletin Parlemenaria hadir dengan semangat baru untuk senantiasa menyajikan berita-berita kegiatan DPR-RI yang informatif. Dengan semangat dan energi baru, Parlemenaria yang selalu setia mengunjungi pembaca setiap awal pekan, kali ini ada sedikit tambahan rubrik yakni “Wakil Bicara”.

Sebagai media DPR-RI, jajaran redaksi senantiasa berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Dari sisi kualitas, baik naskah berita maupun foto kian bervariasi sementara dari sisi kuantitas, berita dan informasi tentang kegiatan DPR-RI kini semakin menyebar dan mudah didapatkan.

Distribusi Buletin kita semakin luas. Selain kepada para anggota DPR yang berasal dari seluruh pelosok tanah air, juga didistribusikan kepada para anggota DPRD, perpustakaan kampus, bahkan kedubes/perwakilan asing di Jakarta, kini makin mudah di dapat di terminal Bandara Soekarno-Hatta dan didistribusikan di pesawat terbang Merpati.

Jajaran redaksi ingin semua kegiatan para wakil rakyat bisa diketahui oleh seluruh rakyat. Meski ada berita-berita yang negatif, tapi kami menilai pada sejumlah pemberitaan banyak berita positif yang belum mendapat ruang seluasnya di media. Atas dasar itulah kami mencoba melengkapi referensi berita agar masyarakat dapat memberikan penilaian kepada wakil rakyatnya dengan lebih obyektif.

Banyak undang-undang monumental yang telah dihasilkan DPR RI. Seperti UU BPJS, UU Desa, UU Aparatur Sipil Negara yang baru saja disahkan yang diharapkan membawa manfaat besar bagi masyarakat dan bangsa.

Kita semua berharap komitmen sebagai wakil rakyat yang amanah akan dipegang teguh hingga akhir masa bakti DPR periode 2009-2014 pada tanggal 30 September 2014. Parlemenaria akan terus mengawalinya sehingga wakil rakyat kita menorehkan tinta emas selama pengabdianya.

Selamat Tahun Baru 2014, Semoga Sukses melaksanakan amanah dan tugasnya.



PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI | **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (**Sekretaris Jenderal DPR-RI**) | **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum | **PIMPINAN PELAKSANA:** Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan) | **PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (**Kabag Pemberitaan**) | **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dra. Tri Hastuti (**Kasubag Penerbitan**), Mediantoro SE (**Kasubag Pemberitaan**) | **REDAKTUR:** Sugeng Irianto, S.Sos; M. Ibnur Khalid; Iwan Armanias | **SEKRETARIS REDAKSI:** Suciati, S.Sos | **ANGGOTA REDAKSI:** Nita Juwita, S.Sos ; Supriyanto ; Agung Sulistiono, SH | **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Eka Hindra | **FOTOGRAFER:** Rizka Arinindya | **SEKRETARIAT REDAKSI:** I Ketut Sumerta, S. IP | **SIRKULASI:** Abdul Kodir, SH | **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:** BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com; www.dpr.go.id/berita



Wakil Bicara

“Saya akan mengajak kepada seluruh pimpinan DPR, pimpinan fraksi-fraksi, dan seluruh anggota DPR untuk pintar-pintar membagi waktu menyelesaikan tugas-tugas yang masih tersisa di parlemen ini, yang masih membutuhkan pikiran dan tenaga kita. Sementara panggilan lain juga tidak boleh tercecer, yaitu menyelesaikan kerja politik,”



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menjawab pertanyaan wartawan tentang tantangan memasuki tahun politik 2014



Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR RI menyikapi dugaan penyimpangan dana optimalisasi untuk kepentingan Pemilu 2014

“Sekarang seharusnya KPK dapat memanfaatkan popularitasnya itu dan meminta komitmen para pimpinan partai dan meminta anggotanya di parlemen tidak membancak dana optimalisasi untuk kepentingan pemilu, ngomong saja begitu. Sebenarnya pemerintah jangan ikut-ikutan mentolerir, harus tegas, jangan takut sama DPR kalau masalah anggaran negara.”

“Intinya saya setuju Ospek dihapus.”

Jefirston R. Rivu Kore anggota Komisi X menyikapi kasus kekerasan di Kampus ITN Malang mengakibatkan seorang mahasiswa meninggal.



Optimalkan Aspal Buton Untuk Jalan Negara



Tim Kunker Komisi V DPR dipimpin Ketuaanya Laurens Bahang Dama meninjau kawasan industri pertambangan aspal terpadu Buton

Komisi V DPR RI menilai pemerintah belum optimal dalam mengelola aspal, salah satu Sumber Daya Alam (SDA) potensial dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Kebijakan pemerintah yang lebih memilih impor untuk memenuhi kebutuhan aspal dalam negeri perlu dikoreksi.

“Kabupaten Buton sebagai daerah dengan tambang aspal terbesar di Indonesia, depositnya luar biasa. Saat ini kebutuhan nasional untuk aspal kita sekitar 1,2 juta ton per tahun. Produksi Pertamina baru sekitar 300 ribu ton, 800 ribu ton lainnya impor. Kalau dengan harga sekarang berarti sekitar Rp.7-8 triliun kita membayar untuk impor,” papar Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama saat memimpin Kunjungan Spesifik ke Kawasan Industri Pertambangan Aspal Terpadu di Kabupaten Buton, Rabu (11/12/13).

Sejumlah kajian pakar menyebut pulau di bagian tenggara Sulawesi ini menyimpan sekitar 80 persen dari total cadangan aspal alam dunia, si-

sanya berada di Trinidad, Meksiko dan Kanada. Laurens berharap pemerintah serius untuk mengoptimalkan potensi ini terutama untuk membangun jalan negara.

“Kita perlu memaksimalkan aspal Buton. Pemerintah pusat supaya mengurangi impor karena kita punya potensi aspal yang luar biasa. Kalau soal kualitas, itu bisa ditingkatkan dengan pendekatan teknologinya. Sekian persen dari potensi ini bisa digunakan untuk jalan negara atau jalan yang dibiayai APBN,” ujarnya.

Wakil rakyat dari Dapil NTT ini berjanji setelah melihat secara langsung permasalahan Kawasan Industri Pertambangan Aspal Terpadu dan percepatan pembangunan di Kota Baubau ini akan segera membicarakan dengan kementerian terkait mitra Komisi V.

Sementara itu Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun mengakui pemanfaatan aspal dari daerahnya yang memiliki potensi sekitar 700 juta ton

belum optimal. Jika dikalkulasi harga material aspal 1 ton sebesar Rp 300 ribu, maka kekayaan SDA ini bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membuka lapangan kerja. Pembangunan kawasan industri terpadu diharapkan akan memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk berinvestasi.

“Kita berharap kunjungan Komisi V ke lokasi bisa melihat sendiri potensi SDA ini, sekaligus bisa mendukung pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana termasuk jalan di kawasan industri ini,” kata Bupati Buton.

Terkait dengan wisata, Tamrin menyatakan bahwa potensi wisata Kabupaten Buton belum berbasis data dan berbasis *market*. Selain itu, hampir sama kondisinya dengan infrastruktur, potensi wisata belum banyak mendapat perhatian pemerintah. “Semuanya kami tumpahkan kepada Komisi V, walaupun ini mungkin bukan wewenang Komisi V,” harap Tamrin. (iw)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi VIII Apresiasi Kinerja Baznas Bali

Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kinerja Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Bali yang berhasil mengelola zakat untuk memberdayakan keluarga kategori miskin. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan memotivasi organisasi serupa di daerah lain.

“Kami sangat mengapresiasi karena menurut Ketua Baznas Bali, 70 persen yang mendapat bantuan usaha adalah *mustahik*. Dan alhamdulillah bantuan tersebut digunakan sebagai usaha yang akhirnya bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Hingga kemudian mereka malah dapat menjadi *muzaki* atau orang yang wajib mengeluarkan zakat,” kata Ketua Komisi VIII, Ida Fauziah saat mengunjungi Desa Candi Kuning II, Baturiti, Tabanan Bedugul, Provinsi Bali, Jumat (13/12) lalu.

Ditambahkan Ida, program pemberian bantuan modal usaha bagi rakyat miskin ini dinamakan Rumah Makmur Baznas. Sejak dibentuk April lalu, program ini telah berhasil menyalurkan Rp. 170 juta untuk 35 orang.

“Hari ini kami melihat sendiri bahwa penyaluran zakat oleh Baznas itu



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII saat meninjau perkebunan sayur mayur sumbangan Baznas, di Bedugul Bali.

benar-benar digunakan untuk yang membutuhkan. Diantaranya digunakan untuk usaha budidaya strawberry, jagung dan berbagai sayuran yang kemudian dijual dan akhirnya bisa meningkatkan ekonomi keluarga,” ungkap Ida.

Tim Kunjungan Komisi VIII dalam

kesempatan itu juga berdialog dengan masyarakat Desa Candi Kuning menghimpun sejumlah masukan terkait pelaksanaan program ini. Temuan yang berhasil dihimpun ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi program yang tengah dijalankan Baznas maupun Kementerian dan Lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi VIII. (Ayu)

Baleg Setujui 22 RUU Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI (Pleno Baleg) dipimpin Ketua Baleg, Ignatius Mulyono, Senin (16/12), menyetujui 22 Rancangan Undang-undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru (RUU DOB).

Menurut Mulyono, sebagaimana laporan Panja Harmonisasi 22 RUU Pembentukan DOB, Panja telah melakukan harmonisasi dan telah disesuaikan dengan ketentuan yang ada kepada seluruh RUU Pembentukan DOB usul Komisi II DPR RI tersebut.

“Mudah-mudahan semuanya dapat

disetujui untuk dapat kita lanjutkan kepada Komisi II DPR RI menjadi usulan baru di Paripurna Selasa (17/12). Apakah rekan-rekan dari fraksi-fraksi seluruhnya dapat menyetujui,” tegas Mulyono di Ruang Rapat Baleg, Gedung DPR RI, Jakarta.

Seluruh anggota Baleg yang hadir, langsung menyatakan persetujuannya. “Setuju”.

Ke 22 RUU DOB tersebut, antara lain Daerah Otonomi Baru Provinsi Sumatera Tenggara, Kabupaten Kepulauan Natuna Selatan, Kabupaten Kepulauan



Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono. Natuna Barat, Kabupaten Cilangka-



Pimpinan dan Anggota Baleg dan Komisi II DPR saat lobi pembentukan DOB.

han, Kabupaten Caringin, Kabupaten Cibaliung, Kabupaten Luwuk Tengah, Kabupaten Moutong, Kabupaten Tomini Raya, Kabupaten Balanifa, Kabupaten Indragiri Selatan, Kabupaten Tayan, Kalimantan Barat, Kabupaten Sebatik, Kabupaten Samaraewa, Kabupaten Galilea Loloda, Kabupaten Kemu, Papua, Kabupaten Biak Nafasoandewe, Kabupaten Mimika Barat, Kabupaten Mimika Timur, Kabupaten Moni, Kabupaten Yamo, dan Kabupaten Lembah Raupaer.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua Panja Harmonisasi

22 RUU Pembentukan DOB, Sunardi Ayub saat melaporkan hasil kerja Panja kepada Pleno Baleg menyatakan, dari aspek teknis, substantif dan azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan secara keseluruhan 22 RUU Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan Komisi II DPR RI telah memenuhi ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Pengharmonisasian, Pembulatan dan pematapan konsepsi terhadap 22

RUU Daerah Otonomi Baru telah dibiarkan Panja, melalui pembahasan secara intensif dan komprehensif,” kata Sunardi.

Dijelaskan politisi Fraksi Hanura ini, bahwa pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi mencakup kajian aspek teknis, substantif dan azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan DPR RI.

Selain itu, kata Sunardi, kajian yang dilakukan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya aspek syarat pembentukan daerah otonom yang terdiri syarat administratif, fisik dan teknis.

Namun, Sunardi mengingatkan, bahwa masih terdapat beberapa catatan menyangkut aspek teknis dan substantif yang perlu disempurnakan baik dari segi redaksional maupun substansinya.

“Hal ini telah dilakukan oleh Tim Baleg sebagaimana dituangkan dalam kajian dari masing-masing RUU tersebut dan menjadi perhatian Komisi II jika nanti proses pembahasan dengan pemerintah,” tegas Sunardi. (sc) Foto: *odjie/parle.*

Ketua DPR Terima Kunjungan Dubes Irak



Ketua DPR RI Marzuki Alie bertukar cinderamata dengan Dubes Irak Abdullah Hasan Salih.

Ketua DPR Marzuki Alie di ruang kerjanya Lantai III Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (16/12) menerima kunjungan kehormatan Dubes Irak Abdullah Hasan Salih. Sebagai dubes baru, Abdullah berharap agar hubungan Irak dan Indonesia ke depan akan lebih baik khususnya bidang investasi, perdagangan dan saling tukar mahasiswa kedua negara.

Pimpinan DPR dari Partai Demokrat ini mengatakan, hubungan baik kedua negara sangat diperlukan mengingat Irak mempunyai potensi yang besar di bidang migas. Negara itu menargetkan tahun ini bisa memproduksi minyak 3 juta barel perhari dan Pertamina diberi kesempatan untuk mengelola salah satu blok sumber minyak di Irak. Selain itu ada sebuah BUMN Indonesia yang sudah membangun kantor di negara itu dalam pembangunan infrastruktur.

Peran Dubes kata Marzuki sangat penting dalam rangka

meningkatkan hubungan kedua negara di bidang investasi, perdagangan dan bidang-bidang lainnya. Berdasarkan data BPS, nilai perdagangan kedua negara pada tahun 2013 ini mencapai US \$ 45 juta. Peluang ekspor ke Irak adalah tekstil, kertas, furniture, minyak sawit dan barang-barang elektronik

Terkait dengan kerja sama bidang ekonomi sebagaimana

dibahas Ketua DPR dan Dubes Irak, Menko Perekonomian Hatta Rajasa pada Maret 2013 lalu telah menandatangani MOU kerjasama bidang energi, dimana sejak Maret 2013 lalu Irak akan menyuplai minyak ke Indonesia 35.000 barrel per hari ke Indonesia. Di akhir pertemuan yang berlangsung penuh keakraban dan persaudaran ini, kedua pihak saling bertukar cinderamata. (mp)/foto:iwan armanias/parle.

DPR Minta Pemerintah Tuntaskan Persoalan *Outsourcing* di BUMN

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan buruh *outsourcing* di BUMN. "Saya sangat berempati terhadap karyawan *outsourcing* BUMN karena memang seharusnya berdasarkan UU tenaga kerja memang mewajibkan tenaga *outsourcing* untuk diangkat menjadi karyawan tetap," ujarnya usai menerima asosiasi buruh BUMN, di Gedung Nusantara III DPR, Senin, (16/12).

Agar menjadi isu DPR RI, lanjutnya, para pegawai *outsourcing* BUMN harus segera mengirim surat kepada Pimpinan perihal isi perjuangan mereka. "Dengan cara ini dapat segera di disposisikan dalam rapat Bamus untuk diagendakan di Rapat Paripurna," terangnya.

Dia menambahkan, DPR ingin persoalan *outsourcing* ini tidak berlarut-larut dan dapat segera diselesaikan dengan tuntas.

seharusnya, terangnya, bentuknya jangan semacam satgas *outsourc-*



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menerima Asosiasi Buruh BUMN.

ing tetapi seperti tim pengawas DPR terkait *outsourcing*. "Dengan cara ini maka DPR bisa memanggil siapa saja,

dan lintas Komisi, bahkan bisa memanggil Direksi BUMN," tandasnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.

Akhir Tahun Ketua DPR Lantik Anggota PAW

Menjelang pergantian tahun, Ketua DPR RI Marzuki Alie melantik Suparman sebagai anggota Penggantian Antar Waktu (PAW). Ia menggantikan koleganya dari Fraksi Partai Demokrat, Sofyan Ali dari daerah pemilihan Jambi.

Sedianya ada 2 anggota baru yang dilantik dalam upacara ini, namun Nor Baiti yang akan menggantikan Yusran Aspar juga dari F-PD berhalangan hadir. Sebagai anggota

pengganti antar waktu, Suparman akan menjalani masa tugasnya pada sisa waktu periode keanggotaan 2009-2014, sekitar 9 bulan.

Usai pengucapan sumpah, Suparman mendapat ucapan selamat dari Marzuki Alie dan sejumlah pejabat Sekretariat Jenderal DPR. Kepada wartawan usai acara ia mengakui waktunya untuk berbuat sebagai wakil rakyat di Senayan



Ketua DPR RI Marzuki Alie melantik Anggota PAW Suparman.

tidak banyak. “Target saya tidak muluk-muluk. Saya pun menyadari bahwa kerja saya tidak lama. Namun, saya akan berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat Jambi,

terutama kaum petani,” ujarnya di Gedung Nusantara DPR RI, Selasa (31/12/13).

Menurut Suparman, selama ini, kaum petani banyak dibelit oleh persoalan-persoalan yang hingga kini tak terpecahkan. Ia juga menyambut baik informasi yang diperolehnya, kemungkinan akan ditugaskan oleh fraksi di Komisi IV yang membidangi masalah pertanian.

“Informasi dari internal partai yang saya dengar, saya akan ditempatkan di Komisi IV. Namun sebagai kader partai dan baru dilantik sebagai anggota DPR, saya siap ditempatkan di mana saja,” tambahnya.

Ada informasi menarik yang disampaikan Suparman kepada wartawan. Biasanya menjadi anggota DPR adalah karir puncak seorang politisi. Tapi ia ternyata sebaliknya karena pada Pemilu 2014 nanti, ia terdaftar sebagai caleg untuk DPRD Provinsi Jambi. (mh) Foto: wy/parle.

Perlu Didorong Agar BPJS Bisa Dilaksanakan Tepat Waktu



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat diwawancara wartawan.

Adanya pihak-pihak yang meragukan pelaksanaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan mulai 1 Januari 2014 boleh-boleh saja. “Kalau ragu boleh, tetapi saya mengamati PT Askes itu sudah memiliki kantor di 34 Propinsi, sudah disiapkan providernya. Ada masa transisi dalam penerbitan kartu BPJS Kesehatan, tetapi kartu yang lama masih bisa dipakai sehingga pelayanan dengan kartu lama bisa berjalan,” kata Ketua DPR Marzuki Alie

menanggapi pelaksanaan BPJS mulai 1 Januari 2004.

Menurut Marzuki, memang ada persoalan, sisa dana yang lama yang belum dibayar. Ini tanggungjawab siapa, bukan BPJS Kesehatan melainkan tanggungjawab pemerintah untuk melunasinya.

“Jadi jangan dibebankan kepada BPJS Kesehatan dimana kejadiannya

sebelum tahun 2014. Itu saja masalahnya, kalau yang lain saya kira kita dukung Askes sebagai pelaksana BPJS Kesehatan untuk melakukan UU ini,” ungkapnya.

Karena itu Pimpinan Dewan dari Fraksi PD ini meminta jangan meragukan, justru kita dorong agar BPJS bisa dilaksanakan untuk kepentingan rakyat. “Bila ada hal yang masih kurang kita kasih tahu, yang belum jalan kita diskusikan supaya sempurna,” tandas Marzuki menambahkan.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan Selasa (31/12) ini akan meresmikan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dan peluncuran Program Jaminan Kesehatan Nasional. (JKN) di Istana Kepresidenan, Bogor.

Mulai tanggal 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan langsung beroperasi untuk menyelenggarakan JKN. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi pada 1 Juli 2015.

“Presiden yang akan memimpin peresmian ini. Program ini adalah amanat UUD 1945. Ini yang dicita-citakan masyarakat yang menginginkan perlindungan saat sakit,” kata jubir

Kepresidenan Julian Aldrin Pasha.

BPJS Kesehatan ini adalah transformasi dari penyelenggara sebelumnya yaitu PT. Askes. Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan adalah transformasi

dari PT. Jamsostek.

Sekitar 121 juta jiwa menjadi peserta BPJS Kesehatan di awal tahun 2014 ini. Selain itu, BPJS Kesehatan juga sudah menerima pendaftaran kepesertaan

baru. Pemerintah menyatakan dari segi operasional sudah dipersiapkan seoptimal mungkin untuk pelayanan. (mp), foto : iwan armanias/parle/hr.

DPR Tetap Konsisten Dukung Kedaulatan Republik Azerbaijan



Ketua DPR Marzuki Alie menerima Duta Besar Republik Azerbaijan.

Ketua DPR Marzuki Alie di ruang kerjanya Gedung DPR, Senayan, Senin (30/12) menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Azerbaijan Tamerlan Qarayev. Menurut Ketua DPR, dalam pertemuan tersebut ada dua masalah yang dibahas. Pertama, ungkap Marzuki Alie, Dubes Tamerlan mengapresiasi sikap Indonesia yang terus berpihak pada Azerbaijan terkait dengan sengketa wilayah Nogorno-Karabakh yang sekarang di aneksasi oleh Armenia.

Terhadap tragedi kemanusiaan di kota Khojaly, Indonesia bersama-sama parlemen anggota PUIC telah mengeluarkan resolusi melalui Konferensi PUIC ke-7 di Palembang Januari 2013 lalu, berisi tuntutan penyelesaian secara adil dan bermartabat atas masalah kejahatan kemanusiaan pembunuhan massal yang terjadi 21 tahun yang lalu.

Dijelaskan Ketua DPR, Dubes Azerbaijan dalam pertemuan tersebut juga menanyakan sikap Indonesia yang seolah-olah *double standar* terkait dengan rencana pembukaan Kedutaan Besar Armenia di Indonesia yang sudah disetujui oleh Pemerintah RI.

“Apapun yang terjadi, Indonesia tidak akan berubah sikap terhadap Azerbaijan karena itu adalah amanat konstitusi bahwa Indonesia menentang penjajahan suatu negara terhadap negara lain. Indonesia juga sebagai negara yang berperan aktif ikut menciptakan perdamaian dunia,” katanya.

Dalam pidato penutupan Masa Persidangan II tahun sidang 2013/2014 lalu, Ketua DPR dengan tegas meminta Pemerintah untuk menunda pembukaan Kedubes Armenia di Jakarta. “Sikap tersebut merupakan bentuk konsistensi dukungannya terhadap Azerbaijan,” tandas Marzuki Alie menambahkan. (mp), foto : wahyu/parle/hr.

Perlu Analisis Mendalam Lahirkan DOB

Sudah ada 65 Daerah Otonomi Baru (DOB) yang segera masuk ke pembahasan tingkat II di DPR. DOB sebanyak itu perlu dianalisa mendalam dan cermat sejauh mana urgensinya membentuk DOB tersebut.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso usai Rapat Konsultasi tertutup antara Pimpinan DPR dengan Pemerintah yang diwakili Menko Pohan Djoko Suyanto dan Mendagri Gamawan Fauzi, Jumat (27/12). Rapat konsultasi ini menyusul surat resmi DPR RI kepada pemerintah perihal pemekaran daerah hasil keputusan Rapat Paripurna DPR beberapa waktu lalu.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso rapat konsultasi dengan Pemerintah.

“Bagaimana penyelesaian yang paling baik soal ini. Dari pandangan pemerintah, ternyata sama dan seide dengan pandangan kami di DPR. Bisa saja 65 daerah otonomi baru yang diputuskan Paripurna kemarin, tidak semua diloloskan, karena pertimbangan-pertimbangan yang spesifik. Mungkin belum memenuhi persyaratan secara sah dari segi administratif maupun alasan lain yang nanti akan dibicarakan,” papar Priyo yang didampingi Joko Susilo dan Gamawan Fauzi.

Pemerintah sebetulnya mengajukan moratorium pemekaran dengan alasan banyak daerah yang sudah dime-

karkan, ternyata tidak efektif mengelola tata pemerintahannya. DPR, kata Priyo, bisa mengerti dengan pandangan pemerintah tersebut, sepanjang tidak menutup kemungkinan daerah yang memang sangat mendesak untuk dimekarkan.

Sementara itu, Menko Polhukam Djoko Suyanto, menyatakan, pemerintah wajib merespon surat DPR menyangkut pembentukan DOB tersebut. “Latar belakang konsultasi ini didasarkan atas evaluasi terhadap perkembangan daerah-daerah otonom baru sejak diberlakukan UU Otonomi Daerah yang sudah hampir 13 tahun. Dari hasil evaluasi itulah kita

sampaikan pada DPR bahwa harus ada skala prioritas dan pengkajian yang sangat mendalam terhadap usulan pembentukan daerah otonomi baru itu,” jelas Djoko.

Menurut Djoko, tidak semua usulan DOB bisa diloloskan begitu saja tanpa kajian dan analisa mendalam. Selain 65 DOB yang diusulkan, masih ada lagi 22 daerah tambahan yang minta dimekarkan plus 4 lagi tersisa dari usulan pemekaran yang lama. “Ini harus dibicarakan lagi di tingkat I untuk pembahasan prioritas yang lebih tajam,” tandas Djoko. *(mh) foto:ry/parle.*

Setjen DPR Peduli Ketahanan Keluarga



Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti memimpin upacara HUT Hari Ibu ke-85.

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti menyatakan akan memberikan perhatian penuh pada upaya membangun ketahanan keluarga di lingkungan kesetjanaan. Ia meyakini pondasi keluarga karyawan yang kuat akan berpengaruh positif bagi kinerja.

“Saya sering menekankan sesibuk apapun di kantor, pulang malam, jangan sampai melupakan keluarga, keluarga harus nomor satu. Kondisi keluarga jelas mempengaruhi

pekerjaan baik perorangan, unit kerja dan pada akhirnya institusi,” katanya usai memimpin upacara dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-85 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/12/13).

Dalam upacara tersebut Sekjen DPR menyampaikan sambutan tertulis Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengkhawatirkan runtuhnya pondasi ketahanan dalam keluarga. Ini terlihat dari maraknya berbagai persoalan bangsa dan kompleksitas masalah sosial yang terjadi di masyarakat seperti *trafficking*, pornografi, infeksi menular seksual dan HIV/AIDS, narkoba dan kriminalitas lainnya.

“Ketahanan keluarga melalui penanaman nilai-nilai budi pekerti dan iman dan takwa menjadi salah satu pilar untuk menjawab dan mengatasi berbagai permasalahan,” demikian paparan menteri dalam sambutan tertulisnya. Ia juga mengajak perempuan Indonesia untuk maju terus menjaga sosok yang mandiri, kreatif dan inovatif, percaya diri sehingga bersama laki-laki menjadi kekuatan besar dalam membangun bangsa.

Upacara bendera dalam rangka Peringatan Hari Ibu yang diikuti oleh karyawan Setjen MPR, DPR, DPD berlangsung khidmat. Tidak seperti peringatan hari besar nasional lain, kali ini seluruh petugas upacara yang terlibat adalah perempuan.

“Saya kira perempuan bisa berperan di semua bidang dan kebiasaan seluruh petugas pada upacara peringatan Hari Ibu adalah perempuan cukup bagus,” ujar Sekjen DPR yang berkesempatan memberi ucapan selamat kepada komandan upacara, Edrida Pulungan yang sehari-hari bertugas di Bagian Kajian Kebijakan dan Hukum Setjen DPD RI. *(iky) foto:wahyu/parle/iw.*



DPR Setujui Perppu MK



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.

Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (19/12) akhirnya menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Persetujuan Perppu MK ini untuk diundangkan ditempuh melalui voting atau

pengambilan suara.

Langkah voting diambil karena pada Pengambilan Keputusan Tingkat I, belum ditemui kesepakatan antar fraksi. Fraksi PDIP, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PKS menolak Perppu MK ditetapkan menjadi Undang-undang. Sementara

persetujuan datang dari Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, dan Fraksi PKB. Sedangkan, Fraksi PPP tidak memberikan kesimpulan yang jelas.

Karena jumlah penolak dan penerima yang seimbang, dan satu suara tidak jelas, Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung yang bertugas memimpin rapat menawarkan tiga opsi voting, yaitu menerima Perppu, menolak, atau abstain. Sebanyak 369 Anggota Dewan memberikan suaranya.

Voting menghasilkan 221 anggota Dewan mendukung berlakunya Perppu MK, opsi menolak sebanyak 148 orang, dan abstain 0. Dukungan berlakunya Perppu MK datang dari 129 anggota Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar memberikan 26 suara, Fraksi PAN 28 suara, 20 suara dari Fraksi PPP, dan PKB berkontribusi 18 suara.

Sedangkan, suara penolakan dari Fraksi PDIP sebanyak 79 suara, 41 suara dari Fraksi PKS, Fraksi PPP sumbang 3 suara, Fraksi Gerindra 16 suara, dan 9 suara dari Fraksi Hanura.

“Dengan hasil ini, DPR RI menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 diterima dan bisa segera diundangkan,” Pramono menyudahi rapat di Gedung Nusantara II. (sf), foto : naefurodjie/parle/hr.

DPR RI Tuntaskan Enam RUU

DPR telah menuntaskan enam RUU pada masa sidang II Tahun Sidang 2013-2014 ini. Pendapat disampaikan oleh Ketua DPR Marzuki Alie saat menutup masa sidang II tahun Sidang 2013-2014, di Gedung Nusantara II, Kamis, (19/12).

Keenam RUU itu yaitu RUU tentang Administrasi Kependudukan, RUU tentang Desa, RUU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, RUU tentang Perindustrian, RUU tentang Aparatur Sipil Negara, dan RUU tentang Jabatan Notaris.

“Dewan masih menyisakan sekitar



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

30 RUU yang perlu dilanjutkan pembahasannya pada masa sidang yang akan datang,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, DPR harus benar-benar melakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan, khususnya pelaksanaan fungsi legislasi.

“Harapan ini, juga kami tujukan kepada Pemerintah karena kendala penyelesaian beberapa RUU seringkali juga datang dari Pemerintah,” ujarnya. (si), foto : naefuridjie/parle/hr.

Parlemen Myanmar Belajar Demokrasi Kepada Indonesia

Delegasi Parlemen Myanmar melakukan kunjungan ke-negeraan selama beberapa hari di Indonesia. Kunjungan delegasi tersebut bertujuan mempelajari proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia.

“Kita melihat dan menyaksikan bagaimana anggota DPR RI berkontribusi dan kita ingin lihat proses demokrasi yang berlangsung serta mengaplikasikan di Myanmar,” ujar Ketua Parlemen Myanmar H.E Mr. Thura Shwe Mann kepada Ketua DPR RI Marzuki Alie, di Senayan baru-baru ini.

Menurut Thura Shwe Mann, Indonesia dan Myanmar memiliki kesamaan dengan Indonesia baik dari agama maupun adat istiadat. “Kita disini juga meminta masukan bagaimana meningkatkan proses demokratisasi di Myanmar,” terangnya.

Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, sebagai lembaga DPR mendukung kerjasama antara Indonesia dan Myanmar dalam bidang infrastruktur, ekonomi dan perdagangan. “Kami sangat yakin akan memberikan kebaikan kedua rakyat dan memperkuat hubungan antar parlemen,” ujar Marzuki.



Ketua DPR RI Marzuki Alie berjabat tangan dengan Ketua Parlemen Myanmar H.E Mr. Thura Shwe Mann.

Marzuki mengatakan, Apa yang di lakukan Sekjen Myanmar diharapkan semakin mendorong proses demokratisasi. Sementara dirinya juga menilai Sekjen DPR memiliki kapasitas yang memadai dan kita telah mengalami proses demokratisasi selama kurang lebih 13 tahun. “Melalui ini diharapkan dapat memperkuat demokratisasi di Myanmar,” jelasnya. (si), foto : naefurodjie/parle/hr.

DPR Minta Pemerintah Selesaikan PR Hadapi Liberalisasi Perdagangan



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Dewan mendorong Pemerintah untuk segera menyelesaikan bebarapa “pekerjaan rumah” dalam menghadapi liberalisasi perdagangan intra-Asean 2015.

“Dewan mengingatkan kembali Pemerintah, bahwa sejumlah kebijakan dasar pengembangan sektor-sektor Industri prioritas harus segera dituntaskan,” ujar Ketua DPR

Marzuki Alie saat menyampaikan pidato penutupan Masa Sidang II tahun 2013-2014, di Gedung Nusantara II, Kamis, (19/12).

Isu pembangunan sektor pertanian, lanjutnya, khususnya isu ketahanan pangan, didalam konferensi WTO di Bali baru-baru ini, telah membuka ruang subsidi bagi sektor pertanian oleh Pemerintah negara-negara berkembang dalam rentang waktu empat tahun kedepan.

“Pimpinan dewan memandang bahwa isu ini menjadi semakin mendesak untuk diperhatikan Pemerintah, ketika impor pangan nasional tetap tidak dapat dibendung, sementara pada saat yang sama, tingkat konversi lahan pertanian menjadi non pertanian tersub berlangsung,” jelasnya.

Dia menambahkan, dalam rangka ketahanan pangan nasional, pimpinan Dewan memandang bahwa kebijakan pengendalian konversi lahan, penguatan subsidi pangan, benih dan pupuk harus ditingkatkan. “Kebijakan pengurangan subsidi energi patut terus didukung sehingga beban subsidi untuk sektor pertanian dan sektor-sektor strategis lainnya, mendapat porsi proporsional,” paparnya. (si), foto : wahyu/parle/hr.



RUU Perindustrian Disetujui Jadi UU



Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satrya Wardhana berjabat tangan dengan Menteri Perindustrian.

Rapat Paripurna DPR, Kamis (19/12) menyetujui RUU tentang Perindustrian untuk disahkan menjadi UU. RUU ini merupakan usul inisiatif pemerintah, nantinya menjadi rujukan regulasi untuk membangun industri nasional yang mandiri dan kompetitif.

Konstruksi RUU Perindustrian yang selama ini dibahas DPR diorientasikan untuk memberdayakan industri kecil

menengah. Erik Satrya Wardhana (F-Hanura) Wakil Ketua Komisi VI saat membacakan laporan Komisi VI di Rapat Paripurna, menjelaskan, industri kecil menengah akan mendapat perhatian penuh dengan memberikan berbagai fasilitas, insentif, dan kemudahan.

RUU usulan pemerintah ini, terdiri dari 17 bab dan 125 pasal. "RUU ini ber-

tujuan untuk mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional," kata Erik di hadapan Rapat Paripurna, yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Dalam RUU ini, industri nasional juga diharapkan bisa mandiri, kompetitif, punya kepastian usaha, dan berorientasi pada industri hijau.

Yang tidak kalah pentingnya, kelak bila RUU ini sudah disahkan, akan dibentuk Komite Industri Nasional yang diatur oleh UU. Keberadaan Komite Industri Nasional diperlukan untuk melakukan koordinasi pembangunan industri, agar saling bersinergi dan satu arah dalam menguatkan struktur perekonomian nasional.

"Diharapkan UU Perindustrian dapat menjadi landasan hukum yang kuat dari aspek legal-formal, sehingga akan memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perindustrian di dalam negeri. Selain itu, UU tentang perindustrian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri Indonesia menjadi industri yang mandiri, maju, dan berdaya saing," kata Erik. (mh), foto : wahyu/parole/hr.

Jelang Akhir Tahun, Komisi V Pantau Infrastruktur Bali

Menjelang akhir tahun, menyambut libur Natal dan Tahun Baru, diprediksi terdapat titik keramaian arus mudik. Dilandasi hal itu, sebagai Komisi yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Komisi V DPR RI melakukan pemantauan di beberapa daerah.

Salah satu daerah yang menjadi tujuan kunjungan spesifik Komisi V adalah Provinsi Bali. Peralnya, di akhir tahun ini, Bali diperkirakan akan dipadati oleh wisatawan, baik asing maupun lokal.

"Tujuan kunjungan ini untuk melihat persiapan infrastruktur menjelang Natal dan Tahun Baru. Komisi V memilih

Bali karena biasanya menjelang Natal dan Tahun Baru sangat padat sekali, baik turis dalam maupun luar negeri," jelas Wakil Ketua Komisi V Muhidin Mohamad Said saat memimpin tim kunjungan spesifik Komisi V di Denpasar, Bali (18/12).

Muhidin menambahkan, pantauan diarahkan ke persiapan-persiapan alat-alat transportasi maupun infrastruktur, baik di darat, laut, maupun udara di Bali. Kunjungan ini, kata Muhidin, diharapkan dapat dimanfaatkan Pemerintah Daerah Bali untuk diskusi terkait permasalahan di Provinsi yang dikenal juga dengan nama Pulau Dewata.

"Sebagaimana kita tahu, kondisi Bali saat ini sangat padat sekali. Masalah infrastruktur jalan, baik jalan Provinsi maupun jalan Kabupaten, Pemerintah Daerah Bali secara tidak langsung menyatakan tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan keseluruhan secara langsung, sehingga dibutuhkan bantuan dari Pemerintah Pusat," imbuh Muhidin.

Politisi Golkar ini menyatakan, akibat dari padatnya jalan, imbasnya ke macet, sehingga untuk menempuh perjalanan di Bali, membutuhkan waktu tempuh yang lebih lama. Padahal, di Bali bukan hanya dipenuhi oleh wisatawan, namun juga sebagai tuan



Tim Kunjungan spesifik dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said mengunjungi Pelabuhan Padangbai, Bali.

rumah acara-acara internasional, seperti APEC dan WTO.

“Kita bisa memahami bagaimana kondisi Bali saat ini, oleh karena itu kita persilahkan Pemda Bali untuk mempersiapkan, baik dari sisi administrasi, maupun penyiapan lahan. Ha-

sil persiapan ini, bisa dipresentasikan ke Kementerian Perhubungan,” imbuh Muhidin.

Jika dikatakan layak oleh Kemenhub, hasilnya bisa disampaikan kepada Komisi V. Nantinya di Komisi V dapat didiskusikan sekaligus untuk persiap-

an tahap berikutnya. Pasalnya, Ada aturan administratif dan perundang-undangan yang mengatur, sehingga perlu disinkronisasikan.

“Bali bukan hanya tujuan wisata, namun juga sebagai tempat kegiatan bertaraf internasional. Jadi, wajar jika Bali perlu mendapat perhatian khusus. Karena Bali merupakan wujud citra negara bangsa kita juga. Seharusnya Pemerintah Pusat juga harus memahami ini. Walaupun ini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Bali, namun juga ini merupakan aset wisata nasional, sehingga Pusat perlu memahami hal ini,” jelas Muhidin.

Muhidin menjelaskan, selain ke Bali, Komisi V juga melakukan pemantauan di Banten hingga Lampung, Sumatera Utara, dan Maluku.

Tujuan pemantauan dalam kunjungan spesifik ini di Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, *Underpass Dewa Ruci*, Jalan Tol Bali Mandara, dan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. (sf)

Dewan Apresiasi MOU BUMN Dengan Myanmar

DPR mengapresiasi MOU kerjasama BUMN Indonesia dalam bidang kelistrikan, perbankan dan Pupuk dengan perusahaan Myanmar. Pendapat itu disampaikan oleh Ketua DPR Marzuki Alie saat courtesy call dengan Delegasi Ketua Parlemen Myanmar H.E Mr. Thura Shwe Mann, di Senayan baru ini.

Saat ini, lanjut Marzuki Alie, terdapat 12 perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Myanmar dengan nilai investasi mencapai 250 juta dollar. “Kami berharap kedepan dapat ditingkatkan kerjasama perdagangan dan investasi yang lebih erat, sebagaimana yang ditargetkan bahwa dalam tiga atau empat tahun kedepan, volume perdagangan bilateral Indonesia-Myanmar dapat mencapai 1 miliar dollar,” terangnya.



Ketua DPR Marzuki Alie menggelar courtesy call dengan Delegasi Parlemen Myanmar.

Pada kesempatan itu, terangnya, DPR RI mendukung kepemimpinan Myanmar dalam Asean saat ini, yang sekaligus merupakan kemajuan besar bagi Myanmar dan negara Asean lainnya dalam meneguhkan Asean menuju pembentukan Komunitas ASEAN 2015.

“Indonesia berkeyakinan Republik persatuan Myanmar akan tumbuh berkembang menjadi negara modern yang berkemakmuran, demokratis, adil dalam pembangunan dan perlindungan hukum serta HAM,” jelasnya. (si), foto : naefurodji/parle/hr.

Komisi V Dukung Peningkatan Kelas Kantor SAR Ambon

Komisi V DPR RI menilai banyak kejadian musibah di laut, mengingat Maluku adalah wilayah atau provinsi kepulauan. Ini juga menjadi perhatian serius bagi Komisi V memperjuangkan peningkatan kelas Kantor SAR Ambon menjadi grade A.

“Kelas dari Kantor SAR Ambon harus ditingkatkan *grade*-nya. Kalau sekarang *grade* Kantor SAR Ambon adalah B, harusnya A karena melihat begitu luasnya wilayah Maluku,” kata Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena, dalam kunjungan Spesifik Komisi V, saat berlangsung pertemuan dengan mitra kerja dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Senin (16/12), di Ambon.

Maksud dari kunjungan ini, untuk melihat secara langsung kesiapan infrastruktur menjelang natal tahun 2013 dan tahun baru 2014, yang meliputi bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, BMKG dan SAR, serta kesiapan lalu lintas dan angkutan jalan oleh Ditlantas Polda Provinsi Maluku.

Kepala Kantor SAR Ambon Suhri Noster Nobertus Sinaga melaporkan data musibah dari kantor SAR, dari Januari-November 2013 penerbangan nihil, pelayaran rakyat banyak mengalami musibah di perairan laut antar pulau, evakuasi penduduk sekitar DAM Wai Ela, Operasi SAR musibah DAM Wai Ela desa Negeri lima, Penanganan Banjir, dan longsor Ambon.

Untuk mengantisipasi Siaga SAR Natal dan Tahun Baru, kantor SAR Ambon telah berupaya untuk melaksanakan siaga SAR Natal 2013 kantor SAR Ambon, dengan mengerahkan seluruh anggotanya yang hanya 108 orang terbagi 3 Pos. Oleh karena itu, Suhri Noster Nobertus merasa personil SAR yang ada di Ambon untuk menangani musibah dan bencana lainnya hanya ada 76 personil yang dirasakan sangat kurang untuk menangani bila terjadi musibah dan bencana.

Setiap pergantian tugas akan *standby* 15 personil, dengan sarana *rescue* truk, mobil max box, 1 *rescue boat* 2116 panjang 36 meter yang bersandar di dermaga LIPI. Dia memohon dukungan Komisi V untuk mendapatkan kapal 40 meter. “Mohon dukungan Komisi V untuk berkoordinasi dengan pusat agar kapal tersebut bisa ditempatkan di Ambon untuk mendukung bila terjadi musibah di perairan laut



Komisi V memperjuangkan peningkatan kelas Kantor SAR Ambon menjadi grade A, saat pertemuan dengan mitra kerja dan Pemda Prov. Maluku di Ambon.

Maluku,” pintanya.

Sarana minim dirasa minim. Untuk mengantisipasi dan merespon yang akan perbuat dalam melaksanakan operasi sangat terbatas.

Suhri Noster mengatakan perlu adanya penambahan Pos SAR, kantor SAR di Kabupaten dan Kota agar *respond time* terhadap penanganan musibah dapat lebih maksimal. Menurutnya kabupaten Dobo, Bula, dan Saumlaki, perlu dibuka Pos SAR untuk menangani bila terjadi musibah. “Kalau kami berangkat dari Ambon dengan alat yang ada dirasa terlalu jauh,” keluhnya.

Selain itu, Kantor SAR Ambon mengusulkan pembangunan dermaga SAR, yang saat ini masih menumpang pada Dermaga LIPI.

Anggota Delegasi Komisi V yang hadir, Michael Wattimena dari Fraksi Demokrat sebagai Ketua Tim, Etha Bulu (F-PD), Agus Bastian (F-PD), Agung Budi Santoso (F-PD), Yoseph Umar Hadi (F-PDIP), Yudi Widiana Adia (F-PKS), Andi Muawiyah Ramly (F-PKB).

Michael Wattimena menegaskan segala permintaan itu bisa terjadi, apabila kelas Kantor SAR berubah *grade*. “Komisi V akan memperjuangkan peningkatan kelas Kantor SAR Ambon menjadi *grade* A,” tegasnya. (as)

Setjen Serahkan DIPA 2014 ke Masing-masing Biro

Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan rutinitas di Kementerian ataupun Lembaga Negara setiap penghujung tahunnya. Namun, penyerahan ini bukan semata hanya rutinitas saja, melainkan kegiatan untuk menjadikan Kementerian atau Lembaga semakin baik dari tahun ke tahun.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Wiantuningtyastiti kepada seluruh jajaran Kepala Biro maupun Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, pada rapat penyerahan DIPA DPR RI Tahun Anggaran 2014.

“Penyerahan DIPA ini bukan hanya rutinitas, namun ini



Deputi Persidangan dan KSAP Slamet Sutarsono menyerahkan DIPA 2014 kepada Karo Humas dan Pemberitaan Djaka Dwi Winarko.

juga menjadi salah satu hal penting bagi suatu lembaga. Dari tahun ke tahun harus semakin baik,” ujar Win, sapaan akrab Winantuningtyastiti di ruang rapat Setjen, Senin (23/12).

Terkait dengan anggaran, Win juga mengingatkan kepada seluruh jajaran di Setjen DPR agar dapat mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, serta memperhatikan penyerapan anggaran.

“Yang harus menjadi perhatian adalah penyerapan anggaran se-

cara optimal. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian di tahun 2014 harus kita dapatkan, mengingat kita sudah 4 kali berturut-turut mendapatkan gelar ini. Kita harus mempertahankannya,” pesan Win.

Win mengakui, memang sulit untuk dapat menyerap anggaran sesuai dengan target. Ia membeberkan ada beberapa faktor penyebabnya, terutama terkait dengan bidang legislasi di DPR.

“Penyerapan memang relatif sulit untuk sesuai target, terutama legislasi.

Karena legislasi itu ada paket-paket kegiatan, atau tahapan-tahapannya. Ada juga faktor beberapa RUU yang dibahas lebih dari 2 kali masa sidang, ini juga yang membuat anggaran tidak terserap maksimal. Target tidak terpenuhi. Itulah salah satu yang menjadi kendala penyerapan dananya,” ujar Win.

Agar Setjen DPR kembali merebut WTP, Win menyatakan ada beberapa kiat yang sudah disiapkan. Utamanya, komitmen dari pejabat untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku.

“Kita membuat cash planning, harus secara tegas dan komitmen untuk dilaksanakan, karena diikuti dengan berbagai ketentuan. Misalnya, setiap pengajuan anggaran itu harus dilampiri Term of Reference (TOR), daftar hadir, dan pertanggungjawabannya lengkap. Jadi, disusun ke laporan keuangannya itu sesuai standar,” tambah Win.

Di tahun 2014, Setjen DPR mendapatkan DIPA sebesar Rp 3,26 triliun, dengan rincian Rp 2,3 triliun untuk Satker Dewan, dan Rp 888 miliar untuk Satker Setjen. (sf)/foto:wahyu/parle/iw.

Sejumlah Anggota Dewan Dukung Hak Interpelasi Outsourcing



Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima dan Rieke Diah Pitaloka.

Sejumlah anggota Dewan mendukung pengajuan hak interpelasi Outsourcing. Hal itu mengemuka saat Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung, di Gedung Nusantara II, Kamis, (19/12).

“Terkait dengan masalah outsourcing di BUMN terdapat 2000 pekerja

outsourcing BUMN di PHK, karena itu kita mohon bantuan Pimpinan DPR RI mensurati Pemerintah untuk memperhatikan panja outsourcing,” ujar Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi PDIP dihadapan sidang Paripurna.

Dirinya meminta para pekerja yang di PHK segera dipekerjakan kembali dan meminta BUMN terkait menyelesaikan persoalan ini sesuai aturan yang ada.

Menurutnya, perlu segera dibentuk Satgas Outsourcing bahkan jika memungkinkan segera dibentuk tim pengawas DPR RI. “Ini bertujuan agar tercipta pengawasan yang komprehensif dari DPR RI,” terangnya.

Sementara, anggota DPR dari Partai Golkar Poempida Hidayatulloh menegaskan, dalam konteks outsourcing,



Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh.

Menteri BUMN Dahlan Iskan jangan memberikan berita yang muluk-muluk terkait ribuan outsourcing telah diangkat di BUMN Pertamina ataupun PLN.

“Terkait outsourcing Pertamina telah

mengkonversi 7000 karyawan *outsourcing* menjadi karyawan tetap tetapi itu tidak terjadi. Bahkan PLN ada 17 ribu tetapi tidak sesuai,” ujarnya.

Dia menambahkan, Menteri BUMN seharusnya fokus menyelesaikan masalah *outsourcing* jangan melepaskan berita bohong. “Jika tidak,

DPR akan mengajukan hak interpelasi terkait *outsourcing* tersebut,” tambahnya. (si), foto : iwan armanias/parle/hr.

Anggota DPR Ragukan Pembangunan Jembatan Selat Sunda



Tim kunjungan spesifik Komisi V DPR di Pelabuhan Bakauheni.

Rencana pembangunan dan pengembangan Jembatan Selat Sunda (JSS) dituangkan kedalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Nasional Persiapan Pembangunan JSS dan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011 yang ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KISS).

Sesuai dengan pasal 21 dan pasal 22 Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2011, maka pihak yang melaksanakan pengembangan kawasan strategis dan infrastruktur Selat Sunda adalah pemrakarsa proyek dan pemrakasa berkewajiban membiayai dan menyelesaikan penyiapan proyek. Pelaksanaan pembangunan JSS dilakukan melalui Pola Kerjasama Pemerintah dan swasta. Hal tersebut tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126.

Tidak jelasnya rencana realisasi pembangunan jembatan selat Sunda (JSS) memunculkan pesimisme dari

pelbagai kalangan. Salah satunya dari anggota Komisi V DPR RI Nuriswanto dari Fraksi Gerindra. Selasa (17/12).

Ia mengaku ragu atas megaprojek tersebut yang diperkirakan menghabiskan dana Rp 200 triliun itu, bisa terealisasi. Bahkan, ia menyatakan mendukung rencana pembangunan JSS tersebut dibatalkan, asalkan PT ASDP dapat menjamin pelayanan penyeberangan tidak ada kemacetan seperti yang kerap terjadi selama ini.

“Saya dukung rencana pembangunan JSS dibatalkan, jika memang PT ASDP dapat menjamin tidak ada lagi kemacetan di Merak dan Bakauheni, seperti yang selalu dikeluhkan pengusaha jasa angkutan barang selama ini,” ungkapnya saat kunjungan kerja ke Pelabuhan Bakauheni belum lama ini.

Menurutnya, kelancaran pelayanan penyeberangan menjadi syarat utama jika JSS dibatalkan. Dengan ketersediaan 44 armada kapal di jalur penyeberangan Selat Sunda, Nuriswanto

menganggap jumlah armada sebanyak 44 buah itu sudah cukup memadai.

Terkait fasilitas pelabuhan, Nuriswanto menyarankan PT ASDP untuk segera melakukan pembenahan, terutama sarana dan prasarana serta pelayanan di Pelabuhan Bakauheni yang sudah tidak memadai lagi. Dan juga penyelesaian pembangunan dermaga VI dan gang way di Pelabuhan Bakauheni. Sebab, target utama pelayanan adalah kelancaran arus penyeberangan.

“Pelayanan penyeberangan harus maksimal. Jika memang ada sarana yang kurang baik atau rusak, segera mengusulkan perbaikannya. Sehingga pelayanan dapat berjalan lancar,” terangnya.

“Pembangunan dermaga tersebut sudah dianggarkan. Sehingga PT ASDP perlu secepatnya menyelesaikan pembangunan,” kata Nuriswanto.

Karakteristik Perairan Selat Sunda

Sementara anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Zulkifli Anwar mengingatkan bahwa rencana pembangunan JSS haruslah benar-benar memperhatikan karakteristik perairan Selat Sunda dan keberadaan Gunung Anak Krakatau (GAK).

“Selat Sunda memiliki karakteristik yang berbeda. Dan keberadaan GAK benar-benar harus dikaji secara mendalam. Sebab, GAK merupakan gunung api yang memiliki sifat letusan sangat eksplosif. Seperti tergambar pada letusan tahun 1883,” jelasnya.

Lebih lanjut Zulkifli Anwar menegaskan, sampai saat ini pembangunan JSS masih dalam tahap studi kelayakan. Dalam perkembangannya, Menteri Perekonomian menyatakan bahwa Pemerintah belum menentukan opsi

yang tepat terkait dengan pelaksanaan studi kelayakan. Ada 2 opsi pelaksanaan yaitu pertama dilakukan oleh BUMN dan pihak Swasta, dan kedua, dilakukan Pemerintah dengan mengambil dana dari APBN. Pemerintah lebih menginginkan pelaksanaannya adalah BUMN/pihak Swasta sebab untuk TA 2014, tidak ada anggaran APBN untuk JSS.

Direktur Operasional PT ASDP Prastyo Budi Utomo menyatakan pihaknya belum melakukan analisis kemungkinan dampak keberadaan Jembatan

Selat Sunda (JSS) dan rencana peningkatan status Bandara Radin Inten.

Hal itu dikatakannya menjawab pertanyaan anggota Komisi V DPR RI, Ibnu Munzir, yang menanyakan kemungkinan pengaruh dari rencana peningkatan status Bandara Radin Inten dan rencana pembangunan JSS terhadap pelayanan penyeberangan.

Ibnu menyatakan, tidak begitu khawatir dengan hal tersebut. Ini mengingat fokus usaha pelayanan pe-

nyeberangan pada angkutan logistik lintas pulau Jawa dan Sumatera. “Kita belum tahu pengaruhnya. Namun kita yakin pelayanan penyeberangan tetap akan eksis,” pungkasnya.

Secara khusus Tim Kunjungan Spesifik DPR RI yang dipimpin Nusyirwan Soejono, meminta PT ASDP, Kepolisian Negara, TNI dan pihak terkait untuk mempersiapkan pelayanan saat memasuki libur Natal dan Tahun Baru nanti. (hr)

UU Desa Bentuk Persembahan Dewan Untuk Rakyat

Akhirnya setelah melalui 9 kali masa persidangan Dewan melalui Rapat Paripurna DPR, Rabu (18/12) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi UU, dan ini merupakan bentuk persembahan Dewan untuk rakyat.

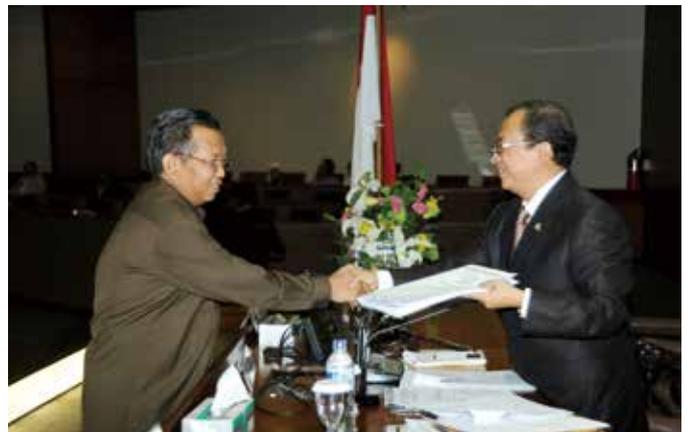
“Inilah persembahan kami, sebagai langkah dalam membangun kehidupan Bangsa Indonesia kedepan, Membangun Desa Membangun Negara, Bravo RUU Desa,...Bravo UUD,...Bravo NKRI,...Jayalah Indonesia,...semoga,”kata Ketua Pansus RUU Desa Akhmad Muqowam dihadapan 379 anggota dewan dan 70 orang perwakilan dari ribuan elemen pejuang desa yang hadir di Balkon Paripurna DPR.

Sebelumnya, pimpinan rapat Paripurna Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menjelaskan, bahwa dengan disahkannya RUU tentang Desa ini merupakan sejarah karena proses panjang pembahasan yang dilakukan sangat melelahkan.

“Dan yang sangat membanggakan bahwa keputusan ini adalah keputusan kita bersama, karena seperti yang kita ketahui, sebenarnya Pemerintah yaitu Presiden dimenit-menit terakhir, masih ada beberapa substansi yang Presiden pertimbangkan, tetapi akhirnya menyetujuinya, dan bisa diketuk palu sekarang,” jelas Priyo.

Dalam laporannya, Ketua Pansus RUU Desa Akhmad Muqowam berharap dengan disahkannya UU Desa ini dapat menjadi regulasi dalam rangka mensejahterakan masyarakat, utamanya masyarakat yang berkehidupan di pedesaan.

Salah satu substansi penting yang tertuang dalam RUU tentang Desa ini menurut Muqowam adalah pengaturan tentang Keuangan Desa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 72 RUU Desa, isinya, bahwa desa mempunyai pendapatan terdiri dari a. Pendapatan Asli Desa, b. Alokasi anggaran APBN, c. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota, d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kab/Kota, e. Bantuan keuangan dari Anggaran



Ketua Pansus RUU Desa Akhmad Muqowam menyerahkan laporan kepada Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso.

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kab/Kota, f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga serta, g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

“Khusus poin b, mengenai alokasi anggaran yang berasal dari APBN, bersumber dari Belanja Pusat dengan efektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan, yang didalam Penjelasan Pasal dijelaskan bahwa besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10 persen dari dan diluar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap,” jelas Muqowam.

Anggaran tersebut, tambahannya, dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.

“Bagi kab/kota yang tidak memberikan alokasi dana tersebut, pemerintah dapat melakukan penundaan dan atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa,” jelas Politis dari Fraksi PPP ini. (nt)/
foto:iwan armanias/parle.

Kemenakertrans dan Perusahaan BUMN Kurang Komunikasi



Anggota Komisi IX DPR RI Sri Rahayu.

Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Rahayu menilai kurang adanya komunikasi antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dengan 20 perusahaan BUMN, terkait implementasi Rekomendasi Panja *Outsourcing* Komisi IX.

“Jika saya perhatikan dari Dirjen PHI dan Jamsos dan Dirjen PPK sama dengan Dewan, bertanya-tanya juga. Oleh karena itu, kedepan harus seiring dan sejalan sehingga tahu perkembangan-

nya terkait dengan implementasi hasil Panja *Outsourcing*,” kata Sri Rahayu saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kemenakertrans dan 20 Dirut perusahaan BUMN terkait Implementasi Rekomendasi Panja *Outsourcing*, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/12)

Selanjutnya, politisi F-PDIP ini, meminta jangan sampai antara pekerjaan pokok dan pekerjaan penunjang seakan-akan pekerjaan penunjang itu boleh-boleh saja dilakukan atau diserahkan kepada orang lain. Sri Rahayu minta agar tetap memperhatikan apa yang menjadi pembagian pekerjaan yang boleh di-*outsourcing*.

“Seperti tadi, pekerjaan Satpam, *Cleaning Service*, Pengemudi, *Catering* dan lain sebagainya memang boleh,” paparnya.

Sebenarnya menurut Sri Rahayu, jika kita menjalankan dengan benar, apakah pekerjaan ini boleh, PKWT atau PKWTT yang mana, sebenarnya tidak akan masalah.

“Karena dengan mengalihdayakan

kepada orang lain, jika itu sesuai dengan ketentuan, tidak akan ada terjadi permasalahan pekerjaan seperti ini,” imbuhnya.

Dari keterangan yang disampaikan Direksi Perusahaan BUMN yang hadir pada rapat tersebut, bahwa ada anak perusahaan, ada cucu perusahaan. Dalam pikirannya, Sri Rahayu mengumpamakan itu sama saja dengan yang menang tender dalam suatu proyek, yang kemudian mensub-subkan pekerjaan. Dimana yang bawah ini mendapatkan yang kecil.

Menurutnya kalau langsung ditangani oleh anak perusahaan atau cucu perusahaannya mungkin dari segi uang lebih efisien, tapi dari segi upah kepada pekerja mungkin akan lebih sejahtera. “Karena perusahaan itu pastilah mencari untung, walaupun anak atau cucu perusahaannya. Ini akan mensupply kepada atasnya,” tegasnya.

Pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan kepada anak perusahaan perlu diawasi betul, kata Sri Rahayu. (sc)/
foto:odjie/parle/iw.

Blokade Bandara, Bupati Ngada Arogan

Aksi blokade Bandara Turelelo, NTT, oleh Bupati Ngada Marianus Sae belum lama ini, mengundang komentar Anggota Komisi V DPR RI Ali Wongso H Sinaga (F-PG). Ia menilai, aksi tersebut sebagai bentuk arogansi sang bupati.

Ali yang dihubungi, Senin, (23/12), menyatakan, prihatin sekaligus kecewa atas kejadian tersebut. “Mustinya kepala daerah tidak boleh begitu. Memang, bisa dimengerti dia punya kebutuhan untuk berangkat pada waktunya karena ada rapat paripurna di DPRD,” katanya.

Kejadian tersebut memperlihatkan ketidaksiapan para staf pendamping sang bupati itu. Bila sudah ada jadwal rapat, mestinya tiket sudah dipesan



Anggota Komisi V DPR RI Ali Wongso H Sinaga.

jauh-jauh hari. “Kalau mendadak risikonya begitu. Enggak bisa dipastikan, karena sudah terjual *seat*-nya,” tutur Ali. Bupati Ngada, NTT, lanjut Ali, tidak boleh

semena-mena dengan tindakannya.

Seperti diberitakan, Marianus Sae sang Bupati yang kesal tidak mendapatkan tiket pesawat Merpati ke NTT, lalu menelepon para Satpol PP di daerahnya dari Kupang, untuk memblokade Bandara Turelelo dengan menaruh mobil di *runway* pesawat. Akibatnya, banyak pesawat tak bisa mendarat dan kembali ke Kupang.

Apakah tindakan bupati tersebut bisa dipidanakan? Ali menjawab, tidak perlu sejauh itu. Ia hanya menyesalkan. “Tapi, kalau ada gugatan *class action* dari masyarakat, ya tidak bisa dihambat. Itu hak masyarakat bila ingin menggugat bupati,” kilahnya. (mh)/
foto:iwan armanias/parle.

Anggota DPR Dukung Penghapusan Ospek

Anggota DPR Jefirston R. Riwu Kore mendukung dihapusnya Masa Orientasi Siswa (MOS) atau Orientasi Studi Dan Pengenalan Kampus (OSPEK). Kegiatan orientasi seyogyanya diarahkan untuk pengenalan program studi, bukan menjadi ajang pelampiasan kekerasan atau penganiayaan fisik bahkan mengakibatkan kematian.

Hal itu dikatakan Jefirtson kepada Parlemen ketika dihubungi Senin (23/12) sehubungan masih terjadinya kekerasan dalam kegiatan ospek di kampus. Kejadian terakhir dialami Fikri mahasiswa ITN Malang meninggal akibat kekerasan seniornya dalam masa ospek.

Tuntutan penghapusan Ospek juga dilontarkan berbagai kalangan pelajar, mahasiswa dan para ibu yang tergabung dalam Yayasan Semai Jiwa Amini (Sejiwa) memperjuangkan anti kekerasan dalam pendidikan. Mereka menyerukan penghentian MOS dan Ospek dalam acara temu damai memperingati Hari Ibu 2013 di Jakarta, Minggu (22/12) “ Hentikan MOS/Ospek”.



Anggota Komisi X DPR RI Jefirston R. Riwu Kore.

Merurut Jefirtson yang duduk di Komisi X (bidang pendidikan dan kebudayaan) Ospek diatur melalui peraturan menteri sehingga perlu ada evaluasi. “ Jangan sampai sudah terjadi kasus lalu bingung, harus ada hukumnya. Banyak kampus yang masih melaksanakan ospek dengan kekerasan dan pemukulan. Intinya saya setuju ospek dihapus,” tegas politisi Partai Demokrat asal NTT ini.

Dia menyarankan, sebagai gantinya

solusi yang ditawarkan agar masa orientasi diisi dengan pelatihan-pelatihan berupa pengenalan kampus yang diberikan dalam ruangan. Pelatihan dan ketrampilan kemahasiswaan dan teknis perkuliahan seperti bagaimana mengambil SKS dan hal lain yang berkaitan dengan kemahasiswaan. Kegiatannya juga diadakan di ruang kuliah bukan di luar, sebab kalau di luar, terbuka untuk melakukan kekerasan fisik.

Yang paling penting lanjut Jefirtson, bagaimana memerlakukan kepada mahasiswa untuk disiapkan sebagai calon intelektual. Mahasiswa sebagai anak bangsa itu punya pendidikan tinggi sebagai generasi penerus, itulah yang perlu dikedepankan. Selain itu juga diberi tambahan wawasan, sebab ketika masih di sekolah lanjutan atas, wawasannya belum begitu banyak, di bangku kuliah wawasannya bisa stabil. “Para mahasiswa juga perlu tambahan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme yang lebih tinggi. Ini juga perlu diberikan dalam masa orientasi itu,” tandas Jefirtson menambahkan. (mp)/foto: iwan

armanias/parle.

Pemda Bisa Keluarkan Kebijakan Pembatasan Konsumsi BBM

Pemda DKI bisa mengeluarkan kebijakan khusus pembatasan konsumsi BBM, tetapi bukan menghilangkan subsidi BBM. Dengan demikian, mestinya subsidi untuk Pemda DKI menjadi penghematan di APBN dan dananya masuk ke kas negara.

Misalnya subsidi BBM sekitar Rp 250 T dan DKI memperoleh sekitar 20%, berarti sekitar Rp 50 T APBN bisa dihemat dengan kebijakan itu. Langkah ini cukup bagus, apalagi bisa memastikan subsidi tidak masuk ke kelompok orang-orang kaya.

“Kalau itu betul, maka Pemerintah pusat dan DPR perlu mengapresiasi dan sebagian penghematan itu bisa diarahkan untuk orang-orang miskin di DKI. Itu baru cocok,” tegas Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis kepada Parlemen di Jakarta, Jumat (20/12).

Dia mengemukakan hal itu menanggapi penjelasan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bahwa, penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jakarta akan diberlakukan untuk kendaraan mobil pribadi. Diharapkan, pengguna mobil pribadi bisa beralih ke angkutan umum sehingga mengurangi kemacetan di ibu kota.

“Ini kan semua dimulai dari kemacetan di Jakarta. Semua jurus ini termasuk ya, harus dike luarkan untuk mengatasi



Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis.

itu,” ujar Jokowi Jakarta Pusat, Kamis (19/12). Menurut Jokowi, untuk kendaraan seperti sepeda motor, bus dan truk tetap diperbolehkan menggunakan BBM subsidi. “Terutama mobil saja. Sepeda motor, truk, bus itu tetap,” jelas dia.

Jokowi menambahkan, saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah berupaya untuk mengurangi kemacetan dengan mempercepat pembangunan MRT, monorail dan menambah bus untuk transportasi massal. “Tapi kan nunggu itu

semua kelamaan. Makanya semua kita akan upayakan, semua lini, supaya hasil benar-benar terasa,” katanya.

Harry Azhar mengatakan, selama ini belum ada aturannya soal penghapusan subsidi BBM, namun kalau pembatasan tergantung dari kebijakan Pemda masing-masing. Dengan pola pembatasan terhadap orang-orang kaya atau mobil pribadi tidak boleh memanfaatkan subsidi perlu mendapat apresiasi. (mp), foto : iwan armanias/parle/hr.

Target Sea Games Gagal, DPR Akan Panggil Menpora dan Koni

Target juara umum Kontingen Indonesia pada Sea Games 2013 hampir dipastikan akan lepas, karena itu Kemenpora dan Koni harus bertanggung jawab. Komisi X DPR nanti akan melakukan evaluasi dengan memanggil Menpora setelah kepulangan kontingen Indonesia.

Demikian ditegaskan anggota Komisi X DPR Zulfadhli kepada Parlemen sebelum menghadiri Rapat Paripurna DPR, Kamis (19/12). Ia mengemukakan hal itu berkaitan dengan perolehan medali hingga saat ini posisi kontingen Indonesia berada nomor empat dibawah Thailand, Vietnam dan Myanmar.

Menurut politisi Partai Golkar ini, pihaknya pesimis Indonesia bisa meraih juara umum melihat persiapan yang memang tidak maksimal. Masalah-



Anggota Komisi X DPR Zulfadhli.

masalah yang dihadapi kontingen sebelum berangkat antara lain masalah honor, gaji, serta pembinaan yang tidak terlalu intensif yang dilakukan oleh pihak Satgas.

“Kita menyayangkan tidak tercapainya target kontingen Indonesia menjadi juara umum, sebab berarti kita tidak bisa membuktikan Indonesia sebagai jawara di kawasan Asean,” ujarnya.

Ia berpendapat mundurnya prestasi atlet kita di Sea Games karena pembinaan yang dilakukan oleh cabang-cabang olahraga kurang intensif, karenanya Pemerintah harus memberi dukungan pembiayaan dan sarana yang memadai.

Komisi X menyarankan, pada Sea Games dua tahun mendatang di Singapura harus segera dipersiapkan Pelatnas jangka panjang, jangan pelatnas menjelang Sea Games saja. Tentunya dengan dukungan pembiayaan dan sarana yang memadai. (mp,aw), foto : wahyu/parle/hr.

Dewan Dukung Pembangunan Bandara Perintis di Bulukumba

Komisi V DPR RI mendukung rencana pembangunan Bandara Perintis di Desa Ara, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan sebagai penunjang pengembangan pembangunan di Bulukumba.

“Masalah pembangunan bandara menjadi sangat penting keberadaannya. Karena perjalanan dari Makasar sampai dengan Bulukumba mencapai 4 sampai 5 jam, kalau itu normal biasa,” kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Roem Kono, saat mengunjungi lokasi pembangunan bandara, di Bulukumba, Rabu (11/12).

“Pariwisata Bulukumba luar biasa dengan indahnya pantainya, makanannya, perlu infrastruktur penunjang terutama masalah bandara ini,” tambah Roem.

Sependapat dengan Roem Kono, teman satu partainya,



Tim Kunjungan Spesifik Komisi V meninjau Pelabuhan Bira di Bulukumba.

Hetifah Sjaifudian menyatakan pembangunan bandara sebaiknya bukan hanya bandara perintis, tapi bandara yang berprospek internasional.

“Harusnya diupayakan pembangunan bukan hanya bandara perintis tapi diprospekkan untuk bandara internasional yang menjadi alternatif Bandara Hasanudin kedepannya,” kata Hetifah.

Menurut Hetifah, pembangunan bandara membutuhkan satu perencanaan yang baik. Oleh karena itu Hetifah

meminta Pemerintah Kabupaten untuk menyusun DEDnya, kemudian memastikan pembebasan lahan sesuai dengan kebutuhan dan mengurus perijinan-perijinan.

“Setelah itu semua diurus, baru nanti pembangunan di tahun berikut, tidak harus di 2014 tapi segala persyaratannya kita sudah persiapkan bersama. Sehingga nanti tidak menunda terlalu lama 2015. Jadi ini sifatnya jangka panjang, tidak bisa semuanya langsung instan, rata-rata ini semua bisa dilakukan,” tegas Hetifah. (sc), foto : suciati/parle/hr.

Paripurna DPR Perpanjang Tugas Tim Pengawas Sengketa Tanah dan Konflik Agraria

Rapat Paripurna DPR yang mengagendakan pengambilan keputusan terhadap laporan kinerja Tim Pengawas Penyelesaian Persengketaan Pertanahan dan Konflik Agraria akhirnya memutuskan untuk memperpanjang tugas tim pengawas hingga tahun sidang mendatang.

Keputusan itu diambil oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat memimpin Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa (17/12), usai mendengarkan laporan Ketua Tim Pengawas Penyelesaian Persengketaan Pertanahan dan Konflik Agraria Arif Wibowo.

Sebelumnya dalam laporannya di rapat paripurna DPR, Arif Wibowo berpendapat bahwa tugas tim ini perlu diperpanjang hingga 2014 mendatang. Pertimbangannya, karena belum adanya *grand design* atas penyelesaian sengketa pertanahan dan konflik agraria selama ini.

Dalam laporan tertulisnya, Arif mengatakan permasalahan pertanahan dan konflik agraria menjadi isu krusial sepanjang sepuluh tahun terakhir. Hal itu dilihat dari banyaknya laporan dan pengaduan masyarakat ke DPR tentang sengketa pertanahan dan konflik agraria.

Dari data yang ada, menurut Arif, pada tahun 2012 terdapat 774 pengaduan masyarakat dan pada tahun 2013 ini terdapat 560 pengaduan masyarakat. “Tingginya laporan dan pengaduan masyarakat tentang sengketa pertanahan dan konflik agraria mencerminkan bahwa masalah tanah



Ketua Tim Pengawas Penyelesaian Persengketaan Pertanahan dan Konflik Agraria Arif Wibowo.

dan agraria merupakan masalah menahun yang belum terselesaikan hingga saat ini,” ungkapnya.

Dalam laporannya politisi dari Fraksi PDIP itu mengungkapkan permasalahan pertanahan dan konflik agraria sangat multi-kompleks karena melibatkan banyak pihak bahkan sarat dengan kepentingan masyarakat seperti hubungan masyarakat atas hak atas tanahnya, hubungan negara dengan tanah, kepemilikan tanah oleh masyarakat hukum adat seperti kepemilikan tanah oleh instansi negara seperti TNI, Polri, BUMN/D, serta tanah sebagai salah satu hak dasar asasi manusia.

Arif menambahkan permasalahan pertanahan dan agraria tersebut dipicu oleh munculnya kebijakan yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan investasi daripada pemerataan kesejahteraan dan ke-makmuran rakyat serta adanya penafsiran tentang konsep pertanahan

dan agraria yang tidak sesuai dengan falsafah dan prinsip dasar UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Kondisi ini kata Arif melahirkan undang-undang sektoral yang berakibat pada terdegradasinya UU Nomor 5 tahun 1960 sehingga terjadi ketidak-sinkronan antara undang-undang sektoral dengan UU No 5 tahun 1960 (UUPA) dan saling tumpang tindih satu sama lain baik secara regulasi maupun kewenangan kelembagaan.

“Hal ini menyebabkan terjadinya konflik agraria dan sengketa pertanahan yang multi dimensi dan berdampak luas sehingga dapat menyebabkan terjadi pelanggaran hak asasi manusia,” katanya.

Mengenai fungsi pengawasan alat kelengkapan dewan yang menangani sengketa pertanahan dan konflik agraria, Arif mengatakan bahwa permasalahan pertanahan dan agraria ini menjadi perhatian beberapa komisi di DPR. Seperti di Komisi I, II, III dan IV.

Secara spesifik, lanjut Arif, Komisi I membahas permasalahan pertanahan dan agraria terkait dengan aset tanah yang dimiliki oleh TNI. Di Komisi II, pembahasan permasalahan pertanahan dan agraria terkait dengan sistem pertanahan yang masih tumpang tindih pengaturannya, di Komisi III soal permasalahan pertanahan dan agraria terkait dengan penegakan hukum atas kasus-kasus pertanahan dan di Komisi IV terkait dengan pertanahan dan agraria yang dimiliki di sektor kehutanan, perkebunan dan pertanian.



Terkait belum adanya *grand design* atas penyelesaian sengketa pertanahan dan konflik agraria selama ini, menurut Arif, *grand design* ini nantinya disusun dengan berdasarkan pada pasal 33 UUD 1945, TAP MPR No IX/

MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

“Meningat belum adanya *grand design* atas penyelesaian sengketa pertanahan dan konflik agrarian, tim berpendapat bahwa tugas tim ini perlu diperpanjang hingga tahun 2014 mendatang,” katanya. (nt)/foto:odjie/parle/iw.

Perpanjangan Masa Tugas Timwas Century Diputuskan Melalui Voting



Pimpinan DPR RI menyaksikan penghitungan hasil voting perpanjangan masa tugas Timwas Century.

Perpanjangan masa tugas Tim Pengawas kasus Bank Century DPR hingga tanggal 30 September 2014 akhirnya diputuskan melalui *voting* (pemungutan suara). Keputusan tersebut diambil setelah terjadi perdebatan yang cukup alot terutama dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang menginginkan timwas diakhiri masa tugasnya pada akhir tahun 2013 dan kasus Century diserahkan kepada Komisi terkait.

Dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung didampingi Ketua DPR Marzuki Alie serta Wakil Ketua Sohibul Iman dan Taufik Kurniawan, Kamis (19/12) sore di Gedung DPR Kamis, posisi yang menyetujui Timwas diperpanjang hingga akhir masa bakti anggota DPR periode 2009-2014 sebanyak 248 orang anggota dan yang menolak diperpanjang sebanyak 154 orang anggota.

Dari jumlah 248 anggota yang setuju memperpanjang masa tugas Timwas Century terdiri 65 orang anggota dari FPG, 79 anggota dari Fraksi PDI Perjuangan, 38 anggota FPKS, 24 anggota FPAN, 18 anggota dari FPKB 18 orang, F Gerindra 15 orang dan 9 orang dari Fraksi Hanura.

Dua fraksi tidak setuju masa tugas Timwas diperpanjang dan menyerahkan kepada Komisi terkait adalah Fraksi Partai Demokrat dengan jumlah anggota 134 orang dan Fraksi Persatuan Pembangunan sebanyak 26 orang anggota.

Dalam salah satu rekomendasi Timwas Century yang tercantum dalam poin (2) menyebutkan, sejalan dengan rekomendasi mengenai perlunya DPR meneruskan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi DPR terhadap penyelesaian kasus Bank Century, maka DPR perlu memperpanjang masa kerja Timwas sampai dengan berakhirnya masa bakti anggota DPR periode 2009-2014 pada tanggal 30 September 2014.

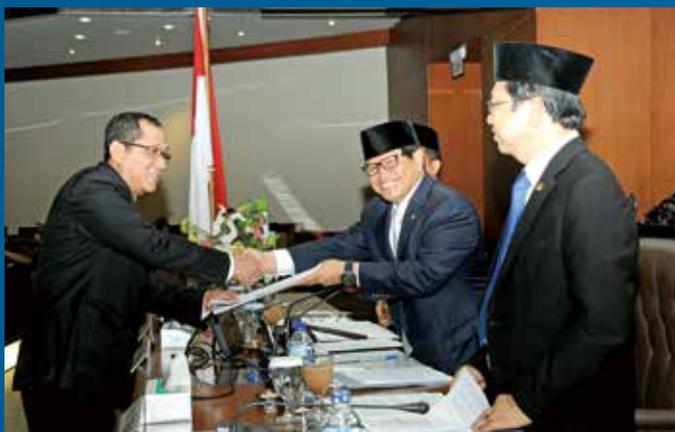
Pengawasan timwas yang masih diperlukan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi DPR terhadap penyelesaian kasus Bank Century yang mencakup penegakan hukum oleh KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Selain itu pengawasan terhadap *asset recovery* oleh pemerintah, pengembalian dana nasabah PT Antaboga dan kebijakan legislasi. (mp), foto : iwan armanias/parle/hr.



Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima Duta Besar Iran untuk Indonesia Mahmoud Farzandeh menyampaikan undangan Sidang Umum OKI di Teheran tanggal 17 Februari 2014, Senin (30/12).
Foto: odjie/parle.



Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar menyerahkan Laporan Pembahasan RUU tentang ASN kepada Menteri PAN & RB Azwar Abubakar dilanjutkan penyerahan sambutan Pemerintah kepada Pimpinan DPR, Kamis (19/12) Foto: iwan armanias/parle.



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Erik Satrya Wardhana menyerahkan Laporan Pembahasan RUU tentang Perindustrian kepada Pimpinan DPR dan kepada Menteri Perindustrian MS Hidayat, Kamis (19/12) Foto: iwan armanias/parle.